



DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**Disusun oleh:
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANJARBARU**

TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Refortmasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka pembangunan zona integritas, langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi reformasi birokrasi, penyederhanaan pada indikator proses dan indicator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana ini dimaksudkan sebagai bahan acuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Perancangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Perancangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Kepala Badan, pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkup Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dengan menandatangani Pakta Integritas.
3. Perancangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas melalui website Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perancangan yang telah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

BAB III
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Menyusun SOP pemilihan tim kerja ZI	SOP Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Januari 2023
			Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI	SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	
			Terbentuknya Tim Kerja ZI		
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi tahun 2023, mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui website	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan di website BP2RD Kota Banjarbaru	Januari 2023
3	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per semester	Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap 3 bulan sekali, tindak lanjut hasil Monev sebelumnya	Undangan rapat, daftar hadir, notulensi rapat, lembar Monev ZI, bukti pelaksanaan tindak lanjut Monev sebelumnya	Oktober, Desember 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.	Daftar hadir/Absensi Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru	Januari s/d Desember 2023
		Agen perubahan sudah ditetapkan	Menyusun SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; Menetapkan SK Tim Agen perubahan	SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; SK Tim Agen Perubahan	Januari 2023
		Budaya kerja dan pola pikir sudah dibangun di lingkungan organisasi	Pengarahan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, apel, dan pengarahan setelah senam pagi	Daftar Hadir Rapat; Notulen; Usulan dan Nota Dinas	Setiap ada pertemuan pada 2023
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Penandatanganan Lembar Komitmen Pembangunan Zona Integritas (Pakta Integritas)	Lembar Komitmen Pembangunan Zona Integritas yang telah ditandatangani seluruh personil di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Januari 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
II.	PENATAAN TATALAKSANA				
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai. SOP telah dievaluasi.	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SOP yang telah ada	Dokumen SOP BP2RD, Laporan Hasil Evaluasi SOP	Desember 2023
2	E-Office	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Penggunaan SIMPEG pada manajemen kepegawaian, Penggunaan WA grup untuk komunikasi internal	Aplikasi SIMPEG, WA grup BP2RD Kota Banjarbaru	Januari – Desember 2023
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Penggunaan website untuk publikasi informasi kepada masyarakat luas	Website resmi BP2RD Kota Banjarbaru yang diperbarui secara rutin	Januari s/d Desember 2023
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik telah dilakukan monev secara berkala	Melakukan Monev pemanfaatan IT setiap enam bulan sekali dengan mengisi formulir MONEV Pemanfaatan IT	Formulir Monev pemanfaatan IT yang telah diisi	Juni, Desember 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
3	Keterbukaan informasi publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan pemohon informasi, Penyediaan kotak pengaduan/saran dan pengaduan melalui website serta email resmi BP2RD	Arsip formulir pemohon informasi publik / data, kotak pengaduan/ saran, pengaduan melaui website dan email resmi BP2RD	Januari s/d Desember 2023
		Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dimonitoring dan di evaluasi secara berkala	Mengevaluasi dokumen Standar Pelayanan (SP) sekali dalam setahun	Dokumen evaluasi Standar Pelayanan (SP)	Desember 2023
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai sesuai ANJAB dan ABK kemudian mengajukan ke BKD Kota Malang	Dokumen analisa kebutuhan pegawai sesuai ANJAB dan ABK, tanda terima penyerahan dokumen ke BKPP Kota Banjarbaru	Januari 2023
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai Non PNS, melakukan rekrutmen dan menempatkannya sesuai kebutuhan	Dokumen analisa kebutuhan pegawai Non PNS, Dokumen proses rekrutmen	Januari 2023
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai	Membuat Analisa SKP	Dokumen Analisa SKP	Juli, Desember

		rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kinerja			2023
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
2	Pola Mutasi Internal	Mutasi pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir pegawai	Analisa SDM sesuai kompetensi	Laporan analisa SDM sesuai kompetensi	Desember 2023
		Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Menyusun Prosedur Mutasi Internal	Dokumen Prosedur Mutasi Internal	Januari 2023
		Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala	Membuat monitoring dan evaluasi efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	Desember 2023
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analisis untuk pengembangan kompetensi	Mengajukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan ke BKPP Kota Banjarbaru	Surat pengajuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan ke BKPP Kota Banjarbaru, Tanda terima surat ke BKPP Kota Banjarbaru	Januari 2023

	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Menyusun matrik rencana pengembangan kompetensi pegawai	Matrik rencana pengembangan kompetensi pegawai	Januari 2023
	Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Prosentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia	Juli, Desember 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian SKP tahunan, DUPAK fungsional	SKP tahun 2023	Januari, Desember 2023
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian SKP struktural	SKP Struktural Tahun 2023	Januari, Desember 2023
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Penilaian DUPAK Fungsional tertentu per semester	DUPAK Fungsional tertentu	Juni, Desember 2023
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan,dll)	Melaksanakan Penilaian Pegawai Teladan, Kriteria yang jelas (SKP menjadi salah satu kriteria)	Dokumen penetetapan pegawai teladan	Januari s/d Desember 2023
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Membuat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai	Daftar nama pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai	Januari s/d Desember 2023
6	Sistem Informasi kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian melalui SIMPEG	SIMPEG dilakukan setiap kali ada perubahan	Januari s/d Desember 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Kepala Badan memberikan pengarahan dan mengesahkan Rencana Kerja Tahun 2023	Lembar pengesahan dokumen Rencana Kerja Tahun 2023	Januari 2023
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Kepala Badan terlibat dan mengesahkan dokumen matrik reviu RENSTRA dan Perjanjian Kinerja	Lembar pengesahan dokumen matrik reviu RENSTRA, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Tahun 2023 beserta perubahannya	Januari 2023
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi rencana kerja setiap 6 bulan sekali	Form laporan evaluasi rencana kerja 2023	Juni, Desember 2023
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun dokumen Renstra, matrik reviu Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja	Dokumen Rensta, matrik reviu Renstra dan Dokumen Perjanjian Kinerja beserta perubahannya	Januari – Februari 2023
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun dokumen Renstra, matrik reviu Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja	Dokumen Rensta, matrik reviu Renstra dan Dokumen Perjanjian Kinerja beserta perubahannya	Januari – Februari 2023

		Terdapat indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun Indikator Kinerja Utama	Dokumen Indikator Kinerja Utama	Februari 2023
		Indikator kinerja telah SMART	Melakukan reviu terhadap dokumen Renstra	Matrik Reviu Renstra	Februari 2023
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP Tahun 2023	Januari 2023
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP Tahun 2023	Januari 2023
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP dengan mengundang Narasumber / Tenaga Ahli	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Kegiatan Penyusunan LAKIP 2023, Dokumentasi pelaksanaan penyusunan LAKIP 2023	Januari 2023
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun SK Penyusun LAKIP	SK Penyusunan LAKIP	Januari 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Pengendalian Gratifikasi	<i>Publiccampaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang standing banner tentang gratifikasi di lingkungan BP2RD Kota Banjarbaru, Mensosialisasikan gratifikasi via website, bekerja sama dengan KPK melaksanakan kegiatan anti korupsi	Dokumentasi standing banner tentang gratifikasi yang terpasang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Informasi tentang gratifikasi pada website	Januari - Desember 2023
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat laporan monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi	Laporan monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi	Januari - Desember 2023
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan BP2RD	Melaksanakan rapat internal sewaktu - waktu sebagai sarana pengendalian internal	Daftar hadir rapat, notulen hasil rapat	Januari – Desember 2023
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Melaksanakan rapat internal sewaktu waktu	Daftar hadir rapat, notulen hasil rapat	Januari - Desember 2023
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Melaksanakan rapat internal sewaktu waktu	Daftar hadir rapat, notulen hasil rapat	Januari 2023 - Desember 2023

		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi terkait dengan SPI kepada seluruh pegawai	Daftar hadir rapat, notulen hasil rapat	Februari 2023
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplemetasikan	Penyediaan kotak pengaduan/saran dan pengaduan melalui website serta email resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumentasi kotak pengaduan/ saran, pengaduan melaui website dan email resmi BP2RD	Januari s/d Desember 2023
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan mempublikasikan	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan publikasi melalui website	Januari s/d Desember 2023
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pangaduan masyarakat	Juni, Desember 2023
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan publikasi melalui website	Juni, Desember 2023
4	Whistle Blowing System	<i>Whistleblowing system</i> sudah diimplementasikan	Membuat pedoman pelaksanaan Whistleblower di lingkungan instansi, Menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SK oleh pimpinan, Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan whistle blower system	Dokumen pedoman pelaksanaan whistleblower, SK pengelola WBS, Daftar hadir sosialisasi, Notulen hasil sosialisasi	Februari 2023

		Evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i> sudah dilakukan	Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun rencana aksi terhadap pelaksanaan WBS 6 bulan sekali	Laporan monitoring dan evaluasi serta rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS	Maret 2023
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i> telah ditindaklanjuti	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS 6 bulan sekali	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS	Juni 2023
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi mengacu pada PerMenPAN dan RB no 37/2012; Pembentukan tim Penanganan benturan kepentingan	Pedoman penanganan benturan kepentingan; SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan	Januari 2023
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Sosialisasi pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkup Dinas Pendidikan	Daftar hadir sosialisasi, notulen hasil sosialisasi	Januari 2023
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun matrik implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Matrik implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Januari s/d Desember 2023
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari s/d Desember 2023

		Hasil evakuasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari s/d Desember 2023
--	--	---	--	--	---------------------------

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun dokumen standar pelayanan publik	SK Penetapan Dokumen Standar pelayanan	Januari 2023
		Standar pelayanan telah di maklumkan	Menyusun Maklumat pelayanan, Mensosialisasikan maklumat pelayanan via website, memasang maklumat pelayanan diresepsionis	Maklumat standar pelayanan, Maklumat tercantum di website dan di resepsionis	Januari 2023
		Terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan	Tersedia dokumen SOP bagi pelaksana standar pelayanan	Dokumen SOP bagi pelaksana standar pelayanan	Januari s/d Desember 2023
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen SP beserta SOP pelaksana	Laporan kaji ulang SP, Perbaikan SOP pelaksana	Januari 2023
2	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Kepala Dinas pada rapat dan apel	Daftar hadir, notulen	Januari 2023
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang pelayanan publik diupload di website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Screenshot website	Januari s/d Desember 2023

		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/ reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Melakukan pemetaan pemberian sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Matrik pemetaan pemberian sanksi/ reward bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Februari 2023
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	-	-	Januari s/d Desember 2023
NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Terdapat inovasi pelayanan	Menyediakan Mobil Pelayanan Keliling	Dokumentasi inovasi pelayanan	Januari s/d Desember 2023
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat	Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat 2023	Januari - Desember 2023
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat pada website BP2RD	Screenshot dari website	Januari 2023
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menyusun laporan analisa dan rencana tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat	Dokumen laporan analisa dan rencana tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat	Januari 2023

BAB IV

PENUTUP

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang dipilih sebagai pilot projet Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas dilakukan secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai SKM di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.

Program Kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Banjarbaru, 03 Februari 2023

KEPALA BADAN



KEMAS AKHMAD RUDI INDRAYAJA, S.SOS, M.AP

NIP. 19740528 199503 1 003

Lampiran 1.

**MEKANISME PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN
2023**

1. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menginstruksikan rapat dan memimpin rapat pembentukan Tim Kerja Zona Integritas yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural eselon III dan IV serta staf yang terkait Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BP2RD Kota Banjarbaru;
2. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengusulkan susunan nama - nama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, peserta rapat memberikan saran dan masukan atas nama - nama yang diusulkan;
3. Setelah pimpinan dan seluruh peserta rapat menyetujui nama - nama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyerahkan kepada masing-masing koordinator Tim Unit untuk menentukan anggota;
4. Sekretaris Badan selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas mengakomodir nama - nama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan menyusun draft Surat Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengesahkan Surat Keputusan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.

Lampiran 2.

**DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN INTEGRITAS
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2023**

No	Target Prioritas
1	Pembentukan Tim Zona Integritas.
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, tindak lanjut hasil monitoring evaluasi.
6	Pelaksanaan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP Kegiatan.
8	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendali Internal.
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui Laporan Keuangan.
13	Menetapkan Agen Perubahan.
14	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
15	Pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.